TSAQAFATUNA
Jurnal Ilmu Pendidikan Islam

Tsaqafatuna: Jurnal Ilmu Pendidikan
Vol. 8, No. 1, Mei 2026

p-ISSN: 2654 -5322
e-ISSN:2654 - 5330
DOI: https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v8i1.1087

Buntet Pesantren Sebagai Pusat Pergerakan: Institusi, Inovasi Pedagogis dan Pendidikan Islam Sebagai Perlawanan Politik

Durrotul Mawahib [1], * Zaenal Masduqi [2], Rosidi Rido [3]
UIN Siber Syekh Nurjati
durrotulaja@gmail.com[1], rosidirido2@gmail.com[2], zaenalmasduqi1@gmail.com[3]

Abstrak

Artikel ini mengkaji Buntet Pesantren Cirebon sebagai pusat pergerakan sosial-politik umat Islam di Jawa Barat pada periode 1928–1946, dengan penekanan pada peran institusional, inovasi pedagogis, dan politik pendidikan Islam yang diorkestrasi oleh KH. Abbas Abdul Jamil. Melalui pendekatan sejarah sosial-keagamaan dan kajian pustaka yang bersifat kualitatif, artikel ini menunjukkan bahwa Buntet Pesantren berkembang dari lembaga tradisional yang berakar pada jejaring ulama Cirebon menjadi sebuah ekosistem perjuangan yang mengintegrasikan tiga dimensi yang saling menopang: (1) institusi pesantren dan jaringan tarekat sebagai struktur sosial perlawanan; (2) inovasi pedagogis berupa pendirian Madrasah Abna'oul Wathan (1928) sebagai respons kreatif atas kebijakan kolonial Ordonantie Goeroe 1925–1927; dan (3) mobilitasi santri melalui Resolusi Jihad dan laskar Hizbullah-Sabilillah hingga ke medan Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Artikel ini berargumen bahwa pendidikan Islam di Buntet Pesantren pada masa KH. Abbas tidak sekadar merupakan aktivitas instruksional, melainkan merupakan bentuk perlawanan politik yang terstruktur karena kurikulum, metode pengajaran, dan kiai itu sendiri menjadi alat pembentukan kesadaran kebangsaan dan kaderisasi perjuangan. KH. Abbas Abdul Jamil direpresentasikan sebagai "kiai pejuang-sekaligus-pembaharu" yang memadukan tradisi keilmuan pesantren dengan tuntutan gerakan nasional, sehingga Buntet layak diposisikan sebagai salah satu simpul penting dalam historiografi pergerakan kemerdekaan Indonesia yang selama ini kurang terangkat.
Kata Kunci: Buntet Pesantren, KH. Abbas Abdul Jamil, inovasi pedagogis, pendidikan Islam, perlawanan politik, Resolusi Jihad, Hizbullah

Abstract

This article examines Buntet Pesantren Cirebon as a center for the socio-political movement of Muslims in West Java during the 1928–1946 period, emphasizing the institutional role, pedagogical innovations, and Islamic educational politics orchestrated by KH. Abbas Abdul Jamil. Utilizing a socio-religious history approach and qualitative literature review, this study demonstrates that Buntet Pesantren evolved from a traditional institution rooted in the Cirebon scholars' (ulama) network into an ecosystem of struggle integrating three mutually supporting dimensions: (1) the pesantren institution and tariqa network as a social structure of resistance; (2) pedagogical innovation through the establishment of Madrasah Abna'oul Wathan (1928) as a creative response to the colonial Ordonantie Goeroe 1925–1927 policies; and (3) student (santri) mobilization via the Jihad Resolution (Resolusi Jihad) and the Hizbullah-Sabilillah militias leading up to the Battle of November 10, 1945, in Surabaya. This article argues that Islamic education at Buntet Pesantren during the era of KH. Abbas was not merely an instructional activity, but rather a form of structured political resistance because the curriculum, teaching methods, and the kiai himself served as instruments for building national consciousness and cadre preparation for the independence movement. KH. Abbas Abdul Jamil is represented as a "scholar-warrior and reformer" who blended the traditional scholarly heritage of the pesantren with the demands of the national movement, thereby positioning Buntet as a crucial yet historically underrepresented node in the historiography of the Indonesian independence movement.

Keywords: Buntet Pesantren, KH. Abbas Abdul Jamil, pedagogical innovation, Islamic education, political resistance, Jihad Resolution, Hizbullah.

Copyright © 2024 The Author(s). This is an open access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 international license. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0)

Pendahuluan

Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua di Nusantara yang secara historis tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik kolonial. Sejak abad ke-19, pesantren bukan hanya tempat transfer keilmuan agama, tetapi juga menjadi motor penggerak protes sosial-politik, mulai dari Perang Banten 1888, perlawanan Kiai Ahmad Rifa'i di Pekalongan, hingga peristiwa Cimareme 1919 di Garut(Rofii & Sujati, 2022). Dalam konteks Jawa Barat, Pijper menegaskan bahwa Cirebon merupakan pusat pesantren dengan pengaruh kiai yang sangat kuat di tengah masyarakat, sehingga muncul dan berkembangnya organisasi keagamaan maupun politik di wilayah tersebut tidak dapat dipisahkan dari jejaring ulama pesantren (dalam Rofi'i & Sujati, 2022).

Di antara sekian banyak pesantren Cirebon, Buntet Pesantren menempati posisi yang istimewa. Didirikan pada 1785 oleh Kiai Muqoyyim seorang mufti besar Kesultanan Cirebon yang silsilahnya bertaut hingga Sunan Gunung Jati, pesantren ini pada awalnya berlokasi di kawasan Cimarati, Desa Buntet, sebelum kemudian berpindah ke Blok Manis, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura (Hasan, 2014). Posisi ganda pesantren ini sebagai lembaga pendidikan sekaligus bagian dari struktur kekuasaan keraton memberikannya modal sosial yang khas: otoritas keagamaan yang terhubung dengan legitimasi politik tradisional Cirebon.

Puncak kejayaan Buntet Pesantren sebagai pusat pergerakan terjadi di bawah kepemimpinan generasi keempat keturunan pendirinya, yaitu KH. Muhammad Abbas bin Abdul Jamil (lahir 25 Oktober 1879, wafat 1946). Sosok ini menarik untuk dikaji karena beberapa alasan. Pertama, ia mewarisi dan mentransformasi institusi pesantren tradisional melalui inovasi pedagogis yang pada zamannya bersifat kontroversial, yakni memperkenalkan sistem madrasah dan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum pesantren. Kedua, ia menjadikan Buntet sebagai basis pengembangan Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Barat, yang dibuktikan dengan digelarnya Muktamar NU ke-6 di kompleks pesantren ini pada 27 Agustus 1931. Ketiga, ia terlibat langsung dalam perjuangan bersenjata, mulai dari peran politik pada masa Serikat Islam dan pendudukan Jepang hingga mobilisasi santri ke medan Pertempuran Surabaya 10 November 1945, sehingga dijuluki "Singa dari Jawa Barat".

Dalam historiografi nasional, peran pesantren dan kiai dalam perjuangan kemerdekaan kerap kali dipinggirkan, terutama oleh narasi sejarah yang cenderung menonjolkan peran tokoh dan organisasi sekuler-nasionalis. Royyani, (2023), dalam biografinya tentang Kiai Abbas, menegaskan bahwa Kiai Abbas adalah pilar kemerdekaan "dari pinggiran sejarah", yaitu sosok yang memainkan peran simbolis dan praktis yang hampir tidak tercatat dalam kanon sejarah resmi. Kajian terbaru yang dilakukan oleh Amirudin et al., (2023) tentang manhaj dakwah dan Darojat et al., (2023) tentang pemikiran pendidikan Kiai Abbas, berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menunjukkan bahwa pemikiran keagamaan dan pendidikan Kiai Abbas menjadi landasan ideologis bagi gerakan

kemerdekaan. Di sisi lain, Pertempuran 10 November 1945 masih jarang ditelaah dari perspektif peran agama, khususnya melalui fatwa jihad (Syah et al., 2025).

Penelitian terdahulu telah memotret Kiai Abbas dan Buntet Pesantren dari beberapa sudut. (Rofii & Sujati, 2022) menelusuri perjuangan Kiai Abbas pada 1928–1945 sebagai bentuk nasionalisme anti-kolonial melalui metode sejarah. Amirudin et al. (2023) menitikberatkan pada pemikiran keagamaan dan manhaj dakwahnya, sedangkan Darojat et al. (2023) menelaah pemikiran pendidikannya sebagai respons atas kebangkitan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Ketiganya menjadi pijakan artikel ini. Namun, sejauh penelusuran penulis, belum ada kajian yang secara eksplisit memperlakukan institusi pesantren dan jejaring tarekat, inovasi pedagogis, serta mobilisasi politik sebagai satu rangkaian proses yang saling bergantung, sekaligus menguraikan mekanisme yang menghubungkan praktik pendidikan dengan pembentukan kesadaran kebangsaan dan mobilisasi politik. Nilai tambah artikel ini terletak pada tiga hal: (1) sintesis institusi, pedagogi, dan politik sebagai kerangka analitis "pesantren-pergerakan"; (2) pembacaan pendirian Madrasah Abna'oul Wathan dalam konteks kebijakan Ordonansi Guru yang membatasi pendidikan Islam (Hamzah, 2024); dan (3) pembedaan yang tegas antara fakta yang didukung sumber dan interpretasi penulis mengenai hubungan antara pendidikan dan perlawanan politik.

Artikel ini merumuskan tiga persoalan kajian. Pertama, bagaimana konfigurasi institusional Buntet Pesantren dan jejaring ulama yang melahirkannya sebagai basis pergerakan? Kedua, bagaimana inovasi pedagogis KH. Abbas Abdul Jamil, khususnya pendirian Madrasah Abna'oul Wathan, dipahami sebagai respons politik terhadap kolonialisme pendidikan? Ketiga, bagaimana pendidikan Islam di Buntet difungsikan sebagai instrumen perlawanan politik hingga ke medan tempur? Artikel ini berargumen bahwa ketiga dimensi tersebut membentuk satu kesatuan sistemik: institusi menyediakan struktur, inovasi pedagogis menyediakan isi dan metode, dan keduanya bersatu menghasilkan kader-kader perjuangan yang menjadikan pendidikan sebagai perlawanan politik itu sendiri.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer dan sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi/tesis, dokumen arsip, dan literatur sejarah yang relevan ditelaah secara kritis. Penelusuran sumber dilakukan melalui portal jurnal ilmiah, basis data terbuka, dan repositori perguruan tinggi dengan kata kunci seperti "Buntet", "Kiai Abbas", "Resolusi Jihad", "Ordonansi Guru", dan "pendidikan pesantren". Kriteria pemilihan literatur meliputi (1) relevansi langsung dengan Buntet Pesantren, KH. Abbas Abdul Jamil, atau konteks kolonial dan revolusi yang melingkupinya; (2) publikasi pada jurnal ilmiah atau penerbit yang dapat ditelusuri, dengan prioritas pada artikel yang memiliki DOI; dan (3) kejelasan rujukan serta metode penulisannya. Kredibilitas sumber sejarah dinilai berdasarkan kedekatan sumber dengan peristiwa, kejelasan rujukan yang

digunakan, dan konsistensi antarsumber. Dokumen arsip terutama dibaca melalui literatur yang mengutipnya, sedangkan narasi biografis dan cerita tutur, termasuk kisah kesaktian, diperlakukan sebagai tradisi yang perlu diverifikasi dan tidak dijadikan satu-satunya dasar klaim. Apabila informasi berbeda antarsumber, misalnya pada tahun atau penanggalan peristiwa, penulis mengutamakan sumber akademik dengan rujukan paling jelas, membandingkannya dengan sumber lain, dan menyebutkan perbedaan tersebut bila tidak dapat diselesaikan. Penelaahan atas perkembangan terbaru literatur (2020–2025) menjadi prioritas, sementara beberapa rujukan klasik (seperti Dhofier, 2011; Muhaimin, 2003)) tetap digunakan karena menjadi landasan historiografi topik ini. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam tiga kawasan kajian: institusi, pedagogi, dan politik. Pendekatan sejarah sosial dipilih untuk menangkap hubungan dialektis antara struktur pesantren, gagasan pendidikan, dan tindakan politik para kiai. Pembacaan dilakukan secara kronologis dalam tiga fase, yaitu pembentukan institusi dan jejaring ulama hingga awal abad ke-20, inovasi pedagogis dan konsolidasi organisasi sejak 1928 (Madrasah Abna'oul Wathan dan Muktamar NU ke-6 pada 1931), serta pendudukan Jepang dan revolusi 1945–1946 (laskar dan Resolusi Jihad). Setiap peristiwa ditempatkan dalam konteks historisnya, yakni kebijakan kolonial seperti Ordonansi Guru, dinamika gerakan nasional, dan perubahan politik pada masa pendudukan Jepang, sehingga hubungan antarperistiwa dibaca sebagai proses dan bukan sebagai rangkaian fakta yang terpisah (Kartodirdjo, 1992; Sulasman, 2014). Tahap kerja mengikuti prosedur penelitian sejarah, yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah (Sulasman, 2014; Syah et al., 2025). Artikel ini juga membedakan secara eksplisit antara fakta yang didukung sumber dan interpretasi penulis

Hasil dan Pembahasan

Institusi: Akar Ulama dan Jejaring Kiai Buntet

Pemahaman atas perjuangan KH. Abbas tidak dapat dilepaskan dari akar institusionalnya. Buntet Pesantren didirikan oleh Kiai Muqoyyim, seorang mufti Kesultanan Cirebon yang menggenggam otoritas keagamaan sekaligus birokrasi keraton. Akar silsilah yang bertaut dengan Sunan Gunung Jati memberikan pesantren ini legitimasi spiritual-historis yang tinggi di kalangan umat Islam Cirebon (Amirudin et al., 2023). Dalam terminologi pesantren, kiai-kiai Buntet termasuk kategori "kiai khos", yaitu ulama yang kekuatannya tidak terletak pada kepiawaian politik praktis semata, melainkan pada kharisma keilmuan dan spiritual yang diakui luas (Hasanah et al., 2017) .

Pada generasi ayah KH. Abbas, yaitu KH. Abdul Jamil (menjabat 1842–1910), pesantren ini telah mengalami konsolidasi kurikulum dan jejaring tarekat, terutama Tarekat Syatariyah. Generasi ini pula yang menjadikan Buntet sebagai salah satu simpul tarekat di Cirebon bersama Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dan Tijaniyah (Rofii & Sujati, 2022). Penting dicatat bahwa jejaring tarekat pada masa itu dapat dipahami berfungsi ganda, yaitu sebagai jaringan spiritual dan sebagai saluran komunikasi lintas daerah yang berpotensi memungkinkan mobilisasi

massa melampaui batas desa. Pemerintah kolonial sendiri memandang tarekat sebagai gerakan yang berpotensi menggoyahkan kekuasaannya sehingga mengawasinya dengan ketat, terutama setelah peristiwa Cilegon 1888 (Hamzah, 2024). Menurut Amirudin et al. (2023), jejaring pertemanan dan keilmuan Kiai Abbas berkaitan dengan pemahaman keagamaan dan gerakan perlawanan terhadap kolonialisme. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, jaringan tarekat dapat dibaca sebagai salah satu infrastruktur nonformal bagi pergerakan anti-kolonial. Pembacaan ini merupakan interpretasi penulis, karena sumber yang ditelaah belum menelusuri secara rinci bagaimana jaringan tarekat Buntet digunakan untuk mobilisasi.

Buntet pada akhir abad ke-19 juga tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan pusat-pusat keilmuan Jawa Timur melalui praktik santri kelana, yaitu tradisi menuntut ilmu dari pesantren ke pesantren. Jejaring inilah yang kemudian menghubungkan Cirebon dengan Tebuireng, Lirboyo, dan Bangkalan, serta pada gilirannya menjadi tulang punggung gerakan NU di Jawa Barat.

KH. Abbas Abdul Jamil: Sosok, Pendidikan, dan Jejaring Perlawanan

KH. Muhammad Abbas bin Abdul Jamil lahir di Desa Pekalangan, Cirebon, pada 24 Dzulhijjah 1300 H/25 Oktober 1879 (Rofi'i & Sujati, 2022). Pendidikannya menempuh pola khas ulama sepuh Jawa: pembelajaran awal di lingkungan pesantren keluarga, dilanjutkan dengan santri kelana ke pesantren Jatisari dan Sukunsari (Cirebon), pesantren Giren (Tegal), hingga Pesantren Tebuireng di bawah asuhan KH. Hasyim Asy'ari. Di Tebuireng, ia menjadi santri angkatan pertama (1899) bersama KH. Wahab Hasbullah, sebuah pertemanan yang kelak menjadi jaringan strategis gerakan kemerdekaan (Darojat et al., 2023).

Selain di Nusantara, ia menimba ilmu di Masjid al-Haram bersama ulama-ulama kenamaan seperti Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Zubaidi, dan Syekh Mahfudh at-Tarmasi. Pengalaman haji tidak hanya mematangkan keilmuannya, tetapi juga memperluas wawasannya atas dunia Islam internasional. Kembali dari Timur Tengah, ia melanjutkan studi di Tebuireng dan bahkan terlibat dalam pendirian Pesantren Lirboyo bersama KH. Wahab Hasbullah dan KH. Manaf (Amirudin et al., 2023).

Secara spiritual, KH. Abbas menjadi mursyid Tarekat Syatariyah sekaligus muqaddam Tarekat Tijaniyah. Ia merupakan salah satu dari "Tujuh Kiai Besar" muqaddam utama Tijaniyah di Jawa Barat yang diangkat oleh Syekh Ali ibn Abdullah ath-Thayyib al-Madani, bersama KH. Asy'ari Bunyamin, KH. Badruzzaman, KH. Utsman Damiri, serta dua saudaranya sendiri, KH. Anas dan KH. Akyas (Rofi'i & Sujati, 2022). Kombinasi otoritas tarekat ini menjadi modal penting: melalui jaringan Tijaniyah, KH. Abbas mampu menggerakkan kiai-kiai di berbagai daerah untuk bergabung dalam perjuangan.

Karakter kepemimpinan KH. Abbas digambarkan oleh para peneliti sebagai kharismatik-demokratik-religius. Ia dikenal sebagai ulama multidisiplin yang fasih berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan pesilat hingga etnis Tionghoa, dengan menggunakan "bahasa" yang dipahami lawan bicaranya. Pendekatan tanpa kekerasan dan tanpa membalas ini justru

menghasilkan pengaruh sosial yang luas, sebagaimana terlihat dalam kisah pengampunan seorang preman yang akhirnya insyaf (Amirudin et al., 2023). Kualitas inilah yang membuatnya dipercaya tidak hanya sebagai kiai, tetapi juga sebagai politisi ulung yang mampu berdiplomasi di berbagai forum, mulai dari Serikat Islam hingga dewan-dewan legislatif masa pendudukan Jepang.

Inovasi Pedagogis: Madrasah Abna'oul Wathan sebagai Respons Politik

Inovasi paling signifikan dari KH. Abbas adalah transformasi pedagogis Buntet Pesantren. Pada 1928, tahun yang seirama dengan semangat Sumpah Pemuda, ia mendirikan Madrasah Abna'oul Wathan, lembaga pendidikan yang memperkenalkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum pesantren (Darojat et al., 2023). Langkah ini tidak dapat dipahami sebagai sekadar modernisasi kurikulum semata; ia merupakan respons politik yang disengaja terhadap kebijakan kolonial Ordonantie Goeroe 1925–1927 yang mewajibkan setiap guru agama Islam memberitahukan kegiatan mengajarnya kepada pemerintah Hindia Belanda serta tunduk pada pengawasannya (Hamzah, 2024; Rofii & Sujati, 2022). Aturan tersebut, bila dibiarkan, akan memutus rantai transfer keilmuan ulama dan menundukkan pendidikan Islam di bawah kontrol kolonial. KH. Abbas menjawabnya dengan mendirikan madrasah yang secara harfiah berarti "sekolah untuk anak rakyat", sebuah penamaan yang jelas patriotik dan dipilih karena semangat nasionalisme sedang tumbuh.

Prinsip yang mendasari inovasi ini dirumuskan KH. Abbas dengan ajaran Imam asy-Syafi'i: al-muhafadzah 'ala al-qadim as-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah, yang berarti "peliharalah nilai-nilai lama yang baik dan ambillah nilai-nilai baru yang lebih baik" (Muhaimin, 2003). Konkretisasinya berupa komposisi kurikulum yang terukur: sekitar 85 persen pelajaran agama dan 15 persen pelajaran umum, yang mencakup ilmu hisab (aritmetika), Fahrurrozi (tafsir filsafat), al-Jughrafiyah (geografi), *al-Lughah al-Wathaniyah* (Bahasa Indonesia), *at-Thabi'ah* (ilmu alam), dan *Tarikh al-Wathaniyah* (sejarah kebangsaan) (Rofii & Sujati, 2022). Dua mata pelajaran terakhir, yaitu bahasa kebangsaan dan sejarah kebangsaan, dapat dipahami memiliki dimensi politik karena keduanya memperkenalkan identitas kebangsaan ke dalam kurikulum pesantren sehingga berpotensi membentuk kesadaran kebangsaan santri. Sumber yang dirujuk mencatat keberadaan mata pelajaran tersebut tetapi tidak mengukur pengaruhnya terhadap santri, sehingga kaitan ini merupakan interpretasi penulis.

Di samping itu, KH. Abbas merekonstruksi sistem pengajaran dengan lima metode: sorogan, bandongan, *halaqah* (seminar), *madrasi* (sistem klasikal), dan *ngaji pasaran* (Muhaimin, 2003). Pengenalan metode *halaqah* dan sistem klasikal disebut sebagai terobosan Kiai Abbas (Amirudin et al., 2023) dan dapat dipandang sebagai langkah modernisasi pesantren, sementara metode tradisional tetap dipertahankan. Ia juga memodifikasi nama madrasah menjadi Madrasah Salafiyah Syafi'iyah dengan dua jenjang, yaitu persiapan dan ibtidaiyah dengan masa belajar masing-masing tiga tahun, yang menandai langkah profesionalisasi akademik pesantren (Darojat et al., 2023).

Inovasi ini perlu diposisikan dalam konteks yang lebih luas: politik dualisme pendidikan kolonial yang memisahkan pendidikan sekuler dan pendidikan agama (Ajmain et al., 2024; Hamzah, 2024). Konteks tersebut sejalan dengan temuan bahwa lembaga pendidikan Islam di Nusantara, termasuk pesantren, bertransformasi dan beradaptasi sebagai respons atas pengaruh pendidikan modern yang dibawa pemerintah kolonial (Enhas et al., 2023). Dengan memasukkan ilmu umum ke dalam pesantren, KH. Abbas justru melampaui logika dualisme tersebut, sehingga santri tidak lagi dihadapkan pada pilihan antara menjadi kiai yang alim tetapi terpinggir secara sosial-ekonomi, atau sekolah kolonial yang justru mengikis keagamaannya. Pendidikan yang terpadu ini menyiapkan kader ulama yang sekaligus memiliki wawasan kebangsaan: dua kualitas yang dibutuhkan perjuangan.

Selain kurikulum, KH. Abbas juga melakukan inovasi dalam tata kelola dan infrastruktur: merenovasi dan membangun gedung-gedung baru sebagai respons atas lonjakan jumlah santri, serta menerapkan seleksi informal untuk mengidentifikasi dan mengembangkan santri berpotensi melalui bimbingan sorogan langsung (Darojat et al., 2023). Ia juga menerapkan metafora pesantren sebagai "pasar" yang melayani siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, domisili, usia, atau status sosial, sebuah gagasan yang menunjukkan orientasi inklusivitas pendidikannya (Amirudin et al., 2023).

Mekanisme yang menghubungkan praktik pendidikan dengan kesadaran kebangsaan perlu dibedakan dari fakta-fakta di atas. Fakta yang didukung sumber ialah berdirinya madrasah pada 1928, komposisi kurikulum, metode pengajaran, dan konteks kebijakan kolonial. Adapun hubungan sebab-akibatnya merupakan interpretasi penulis yang dapat dirumuskan dalam tiga mekanisme. Pertama, mekanisme kurikuler: mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, geografi, dan sejarah kebangsaan menempatkan tanah air sebagai satuan identitas dan rujukan belajar santri, sehingga kesadaran kebangsaan tumbuh berdampingan dengan penguasaan ilmu agama. Kedua, mekanisme otoritas: kiai yang mengajar adalah figur yang sama dengan pemimpin tarekat dan tokoh organisasi, sehingga pesan kebangsaan disampaikan melalui otoritas yang telah dipercaya santri (Amirudin et al., 2023; Darojat et al., 2023). Ketiga, mekanisme kelembagaan: pendirian madrasah merupakan respons atas pembatasan kolonial terhadap guru agama (Hamzah, 2024) dan menjaga kesinambungan transfer keilmuan, yang pada gilirannya menyediakan ruang kaderisasi bagi perjuangan. Dengan demikian, pendidikan di Buntet dipahami sebagai perlawanan politik bukan karena setiap pelajaran bersifat politis, melainkan karena kurikulum, otoritas kiai, dan kelembagaan madrasah bersama-sama menyiapkan kader yang memiliki kesadaran kebangsaan dan jalur mobilisasi. Dokumen pembelajaran yang dapat menguji hubungan ini secara langsung belum ditemukan dalam literatur yang ditelaah, sehingga hubungan tersebut diajukan sebagai hipotesis analitis

Pesantren sebagai Pusat Pergerakan Politik

Inovasi pedagogis berjalan paralel dengan konsolidasi politik. KH. Abbas menjadikan Buntet sebagai pusat pengembangan NU tahap awal di Jawa Barat khususnya Cirebon, yang kemudian diikuti oleh kiai-kiai lain seperti KH. Mas Abdurrahman (Menes, Banten), KH. Junaidi (Jakarta), dan KH. Ruhiyat (Tasikmalaya) (Rofi'i & Sujati, 2022). Kedekatannya dengan NU tidak terlepas dari ikatan keilmuan di Tebuireng dan kesamaan ideologi Ahlusunnah wal Jamaah. Madrasah Abna'oul Wathan bahkan dipahami sebagai kelanjutan dari semangat *Taswirul Afkar* (organ penggerak NU) yang menegaskan bahwa pendidikan dan organisasi adalah dua sisi perjuangan yang sama (Hasan, 2014).

Puncak peran Buntet sebagai simpul politik tercatat ketika pesantren ini ditunjuk sebagai lokasi Muktamar NU ke-6 pada 12 Rabiul Tsani 1350 H/27 Agustus 1931. Peristiwa ini menegaskan tingkat kepercayaan yang dimiliki kiai-kiai se-Indonesia terhadap Buntet dan KH. Abbas (Darojat et al., 2023). Selain NU, KH. Abbas juga aktif dalam Serikat Islam dan tercatat pernah menjabat sebagai anggota Dewan Hukum SI cabang Cirebon, sementara keterlibatan keraton Cirebon dalam SI sejak 1913 memperlihatkan adanya poros ulama-keraton-rakyat dalam menentang kolonialisme (Rofi'i & Sujati, 2022).

Kiprah politik KH. Abbas mencapai puncaknya pada masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan. Ia dipercaya menduduki posisi-posisi strategis: anggota Dewan Pusat Mustasyar NU, Dewan Syuriah NU Jawa Barat, anggota Tjuo Sangiin (dewan legislatif pusat), anggota Syuu Sangikai (dewan legislatif daerah), wakil ulama Jawa Barat dalam KNIP, dan Rais Syuriah NU Cabang Cirebon (Muhaimin, 2002). Penempatan posisi-posisi ini, menurut analisis Muhaimin, bukan sekadar penghargaan, melainkan strategi agar kiai berada di titik keputusan ketika kebijakan Jepang, atau pemerintahan pasca-Jepang, memihak kekuatan penjajah.

Peristiwa paling menentukan adalah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang digagas KH. Hasyim Asy'ari. Resolusi tersebut diputuskan dalam rapat konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura di Surabaya serta menegaskan bahwa pembelaan tanah air terhadap kembalinya kolonialisme merupakan kewajiban agama bagi umat Islam (Sa'adah et al., 2024; Syah et al., 2025). KH. Abbas, yang disebut sebagai "Singa dari Jawa Barat," termasuk sosok yang ditunggu kehadirannya oleh KH. Hasyim Asy'ari dalam perhelatan itu (Royyani, 2023). Baginya, kemandirian bangsa bukan abstraksi, melainkan sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala daya upaya.

Pendidikan Islam sebagai Perlawanan Politik: Laskar Santri ke Medan Perang

Dimensi paling konkret dari tesis "pendidikan sebagai perlawanan politik" terlihat pada mobilisasi militer yang dilakukan KH. Abbas. Buntet Pesantren menjadi basis latihan pasukan jihad bagi gerakan Hizbullah, Sabilillah, dan PETA (Mulyaningsih & Hamidah, 2018). Menurut Amirudin et al. (2023), di dalam pesantren KH. Abbas membentuk dua satuan paramilitar santri: Asybal (untuk pemuda) dan Athfal (untuk anak-anak), yang menurut sumber yang dirujuk juga melibatkan anak-anak sebagai pengintai dan pendukung logistik (Royyani, 2023). Keterangan tentang keterlibatan anak-anak ini perlu dibaca dengan hati-hati:

rincian usia dan bentuk keterlibatannya tidak diuraikan dalam sumber yang ditelaah, dan praktik tersebut harus ditempatkan dalam konteks revolusi 1945, ketika pertahanan bertumpu pada mobilisasi rakyat dan laskar nonreguler (Syah et al., 2025). Ilmu kanuragan dan bela diri yang diajarkan di pesantren, yang selama ini diasosiasikan dengan tradisi spiritual, berubah fungsi menjadi bekal tempur nyata.

Menurut sumber yang dirujuk, ketika Resolusi Jihad diteguhkan, KH. Abbas mengirimkan santri Buntet dan sekitarnya yang tergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah ke Surabaya untuk memperkuat kekuatan revolusioner (Mulyaningsih & Hamidah, 2018). Buntet dapat dipandang sebagai salah satu basis laskar santri dari Jawa Barat dalam Pertempuran 10 November 1945, meskipun data kuantitatif yang memungkinkan perbandingan dengan daerah lain belum ditemukan dalam literatur yang ditelaah. Peran KH. Abbas dalam pertempuran ini bersifat simultan: simbolis karena kehadirannya sebagai kiai mengobarkan semangat tempur laskar, sebagaimana juga tercatat pada kasus ulama lain yang turun ke garis depan (Subhan, 2023), dan praktis, sebagai panglima yang menggerakkan sumber daya pesantren. Peran KH. Abbas dalam pertempuran ini bersifat simultan: simbolis karena kehadirannya sebagai kiai mengobarkan semangat tempur laskar, sebagaimana juga tercatat pada kasus ulama lain yang turun ke garis depan (Subhan, 2023), dan praktis, sebagai panglima yang menggerakkan sumber daya pesantren.

Perlawanan KH. Abbas tidak berhenti pada aspek militer. Ketika desa-desa sekitar kompleks pesantren porak-poranda akibat serangan militer Belanda, ia membuka dapur umum untuk para pengungsi (Muhaimin, 2003). Ini menunjukkan bahwa perlawanan politiknya bersifat holistik: melawan penjajah secara militer sekaligus merawat komunitas yang menderita, sebagai wujud dari etika keagamaan yang menempatkan kiai sebagai pelindung umat.

Perlu ditegaskan pula bahwa kontribusi pesantren-pesantren, termasuk Buntet, dalam perjuangan bersenjata lahir dari logika khas pendidikan Islam: fatwa jihad yang dihasilkan lewat *bahtsul masa'il* (diskusi hukum) pesantren memberikan legitimasi teologis yang mengubah pertahanan negara menjadi kewajiban individual (*fard'ain*) bagi setiap Muslim (Syah et al., 2025) . Dalam kerangka ini, kelas-kelas pesantren dapat dipahami sebagai ruang pembentukan konsensus politik sebelum santri menjadi tentara. Menurut pembacaan penulis, fatwa jihad, jejaring NU dan tarekat, serta hubungan kiai dengan santri menyediakan jalur yang memungkinkan seruan Resolusi Jihad diterjemahkan menjadi pengiriman laskar, dan jalur inilah yang menghubungkan pendidikan dengan perang. Dalam pembacaan ini, pendidikan dan perang dapat dipandang sebagai satu kesinambungan praktik, bukan dua dunia yang terpisah.

KH. Abbas wafat pada 1946 dan dimakamkan di kompleks pesantren Buntet. Kepemimpinan pesantren diteruskan oleh KH. Mustahdi, KH. Mustamid, KH. Abdullah, dan sejak 2008 oleh KH. Nahduddin Royandi, dengan tetap memelihara tradisi pendidikan yang ia wariskan(Amirudin et al., 2023; Rizqi Nabila, 2025).

Sintesis: Tiga Dimensi dalam Satu Sistem Perlawanan

Kajian ini menemukan bahwa institusi, pedagogi, dan politik dalam Buntet Pesantren di bawah KH. Abbas membentuk satu sistem yang tidak terpisahkan. Institusi (pesantren, tarekat, dan jejaring ulama) menyediakan struktur sosial dan basis massa. Inovasi pedagogis (madrasah, kurikulum campuran, dan metode baru) menyediakan isi yang membentuk kesadaran kebangsaan sekaligus menjaga eksistensi pendidikan Islam dari pengambilalihan kolonial. Politik (NU, Serikat Islam, Resolusi Jihad, dan laskar) menyediakan kanal mobilisasi yang mengubah kesadaran menjadi tindakan. Dalam sintesis ini, Buntet tampil sebagai apa yang dapat disebut "pesantren-pergerakan": lembaga pendidikan yang secara struktural terkonstitusi sebagai kekuatan politik.

Sintesis ini juga menjawab mengapa KH. Abbas layak mendapatkan perhatian historiografi yang lebih besar, termasuk pertimbangan gelar pahlawan nasional sebagaimana yang akhir-akhir ini didorong oleh sejumlah kalangan NU (Royyani, 2023). Di tengah wacana kontemporer tentang pendidikan Islam yang kerap dipisahkan antara dimensi keagamaan dan kebangsaan, pengalaman Buntet menawarkan model alternatif: pendidikan yang religius sekaligus nasionalis dalam kasus Buntet justru menjadi formula perlawanan yang paling efektif.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa Buntet Pesantren di bawah KH. Abbas Abdul Jamil dapat dipahami sebagai "pesantren-pergerakan", yaitu lembaga pendidikan yang institusi, inovasi pedagogis, dan mobilisasi politiknya bekerja sebagai satu proses. Dalam proses tersebut, jejaring ulama dan tarekat menyediakan basis sosial dan saluran komunikasi; inovasi pedagogis, terutama Madrasah Abna'oul Wathan yang berdiri sebagai respons atas kebijakan kolonial, membentuk kader yang menguasai ilmu agama sekaligus berwawasan kebangsaan; dan jalur organisasi serta fatwa jihad menyalurkan kesadaran tersebut menjadi mobilisasi laskar pada 1945. Kontribusi konseptual artikel ini bagi kajian pendidikan Islam ialah pembacaan bahwa perlawanan politik pada masa kolonial tidak semata lahir dari tindakan di luar ruang belajar, tetapi juga dibangun melalui hubungan antara kelembagaan, kurikulum, otoritas kiai, dan jaringan mobilisasi. Pembacaan ini bersifat interpretatif dan berlaku untuk kasus Buntet; generalisasi ke pesantren lain memerlukan kajian komparatif.

Sebagai kajian kepustakaan, studi ini memiliki keterbatasan. Kesimpulan bertumpu pada sumber sekunder dan narasi biografis yang sebagian dipengaruhi tradisi tutur, sehingga hubungan sebab-akibat antara pendidikan dan mobilisasi belum dapat diuji dengan dokumen primer, dan data kuantitatif tentang jumlah santri atau laskar belum tersedia. Penelitian lanjutan disarankan menelusuri arsip kolonial dan dokumen madrasah, melakukan wawancara serta kajian tradisi lisan di Buntet, dan membandingkan Buntet dengan pesantren lain seperti Tebuireng, Lirboyo, atau Tambakberas (Subhan, 2023) untuk menguji sejauh mana kerangka ini dapat digeneralisasi.

Referensi

Ajmain, M., Sultan, U., & Hasanuddin Banten, M. (2024). Melacak Implikasi Politik Pendidikan Kolonial Belanda Terhadap Pendidikan Islam: Sebuah Tinjauan Historis. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, *14*(1), 79–104. https://doi.org/10.22373/JM.V14I1.17995

Amirudin, Darojat, J., Wajd, F., Karim, A., Hidayat, A., & Royyani, M. F. (2023). Kyai Haji Abbas Abdul Jamil's Da'wa Model: The Combination Between Tradition

Aspects with Psychosufism. *Jurnal Penelitian*, 67–80. https://doi.org/10.28918/JUPE.V20I1.109

Darojat, J., Amirudin, A., Wajdi, F., Imadudin, I., Hidayat, A., & Royyani, M. F. (2023). Educational Thought of Kyai Abbas: A Response to the National Awakening and the Struggle for Independence. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, *15*(1), 431–438. https://doi.org/10.37680/qalamuna.v15i1.2572

Dhofier, Zamakhsyari. (2011). *Tradisi pesantren : studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. LP3ES.

Enhas, M. I. G., Zahara, A. N., & Basri, B. (2023). Sejarah, Transformasi, dan Adaptasi Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, *13*(3), 289–310. https://doi.org/10.33367/ji.v13i3.4457

Hamzah, M. (2024). Kebijakan Diskriminatif Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam: Studi Kasus Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar. *Fakta: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *4*(2), 1–20. https://doi.org/10.28944/FAKTA.V4I2.1926

Hasan, H. A. Z. (2014). *Perlawanan dari Tanah Pengasingan; Kiai Abbas, Pesantren Buntet, dan Bela Negara*. LKIS Pelangi Aksara.

Hasanah, J. A., Syekh, I., & Cirebon, N. (2017). PERAN KH. ABDULLAH ABBAS DALAM PERKEMBANGAN PONDOK BUNTET PESANTREN SERTA PENGARUHNYA SEBAGAI KIAI KHOS DI INDONESIA. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, *5*(2). https://doi.org/10.24235/TAMADDUN.V5I2.2104

Kartodirdjo, S. (1992). Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah. *(No Title)*.

Muhaimin. (2003). *Wacana pengembangan pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan PSAPM, Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat, Surabaya.

Mulyaningsih, J., & Hamidah, D. N. (2018). LASKAR SANTRI PEJUANG NEGERI: Rekam Jejak Laskar Hizbullah dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, *6*(2). https://doi.org/10.24235/TAMADDUN.V6I2.3519

Rizqi Nabila, T. (2025). Kepemimpinan K.H. Abdullah Abbas dan Transformasi Pondok Buntet Pesantren Cirebon. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, *7*(1), 1–15. https://doi.org/10.22373/tadabbur.v7i1.734

Rofii, A. F., & Sujati, B. (2022). PERJUANGAN KEMERDEKAAN KIAI ABBAS BUNTET CIREBON PADA 1928-1945. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, *8*(2), 65–77. https://doi.org/10.31332/ZJPI.V8I2.4302

Royyani, M. Fathi. (2023). *Lokomotif perjuangan kemerdekaan : biografi Kiai Abbas Buntet Pesantren*. LP3ES.

Sa'adah, P. L., Syah, M. K. T., Nurcahaya, Y., Samsudin, S., & Sudana, D. S. (2024). Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, *11*(2), 285–298. https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v11i2.13460

Subhan, M. (2023). The Role of the Tambakberas Islamic Boarding School in the Jihad Resolution of the Laskar Hizbullah in the "10 November 1945 War" in Surabaya. *Tsaqofah*, *21*(1), 85–95. https://doi.org/10.32678/TSAQOFAH.V21I1.8040

Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, dan Contoh Aplikasi* (Saebani, Beni Ahmad). Pustaka Setia.

Syah, M. K. T., Sa'adah, P. L., Rofic, Z., Hakim, A., Anwar, R. H. K., Salsabila, M. J., & Syakira, M. K. (2025). Jihad Resolution and the Spirit of Struggle: Historical Traces of the Battle of November 10, 1945. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, *5*(4), 677–688. https://doi.org/10.15575/jis.v5i4.46419